

# *Bagian Pertama*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan memerlukan dukungan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana ekonomi, dan fasilitas layanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana dengan baik apabila kota memiliki dukungan keuangan yang memadai.

Analisis terhadap kondisi dan perkembangan keuangan sebuah kota yang lebih objektif, membutuhkan langkah-langkah dan metode yang praktis dan lazim digunakan secara akademik dan praktis. Pengukuran Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya diperlukan sebagai nilai dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pemungutan pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat untuk beberapa tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi kota. Dengan demikian, keperluan pengukuran PAD adalah untuk menyusun kebutuhan kebijakan dan perencanaan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan tingkat kemandirian daerah di masa datang.

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan ketergantungan yang semakin kecil terhadap pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka kemandirian fiskal, maka porsi pendapatan yang bersumber dari PAD merupakan komponen terbesar dalam pembentukan pendapatan daerah. Hal ini berarti semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PAD.

Secara umum, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat sejauh ini tergolong rendah. Porsi PAD dalam komposisi pendapatan daerah secara agregat pada semester 1 tahun 2020 hanya menyumbang sebesar 10,36%. Komponen terbesar dalam pendapatan daerah adalah dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat ke daerah. Kontribusinya mencapai 80% dari total pendapatan daerah. Dominasi komponen transfer pusat ke daerah pada 19 daerah kabupaten kota tidak hanya terjadi saat pandemi, namun juga berlaku pada periode sebelum pandemi. Namun keberadaan pandemi tak dapat dipungkiri juga telah berdampak terhadap penurunan kemandirian fiskal daerah.

Di Kota Bukittinggi, komposisi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada tahun 2020 adalah sebesar 11,32%. Meskipun angka ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, namun nilainya telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, sebelum mewabahnya pandemi dengan besaran mencapai 13,93%. Penurunan kontribusi PAD dalam komposisi pendapatan daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 merupakan penurunan terbesar setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila ditelaah lebih lanjut kinerja PAD kota Bukittinggi sebelum pandemi, dalam rentang tahun 2016-2019, realisasi PAD Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dan PDRB terutama pada lapangan usaha perdagangan dan jasa. Namun pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi covid-19 realisasi PAD terkoreksi cukup signifikan.

Pandemi covid telah membawa dampak luar biasa bagi perekonomian Kota Bukittinggi. Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2020) melaporkan bahwa Kota Bukittinggi merupakan daerah yang mengalami penurunan pendapatan pajak dan retribusi terbesar jika dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Realisasi penerimaan pajak pada triwulan 3 tahun 2020 mengalami penurunan hingga lebih dari 11%, dengan kontraksi pada nilai nominal mencapai -29,92%. Pandemi covid juga telah memaksa pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan penurunan target PAD hingga mencapai 49%.

Berkurangnya penerimaan pajak dan retribusi daerah disebabkan karena terjadinya penurunan aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan terbatasnya kegiatan pariwisata yang menjadi salah satu moda penggerak perekonomian Kota Bukittinggi. Hal ini menyebabkan pendapatan dari pajak yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata seperti pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan, hingga retribusi parkir juga mengalami penurunan yang signifikan. Penerapan PSBB juga menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian yang juga berkontribusi terhadap penurunan pendapatan daerah.

Memasuki *new normal*, sejalan dengan telah berakhirnya masa PSBB pada akhir tahun 2020, kegiatan perekonomian mulai kembali menggeliat. Kondisi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian lokal dan mendongkrak penerimaan daerah secara lebih cepat. Untuk mengetahui sejauh mana potensi penerimaan Kota Bukittinggi yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, baik yang telah teridentifikasi maupun potensi objek pajak dan retribusi baru, serta seberapa jauh peningkatan itu dapat terjadi, maka perlu dilakukan kajian potensi pajak dan retribusi daerah yang bersifat komprehensif.

Potensi pajak dan retribusi daerah perlu diukur secara akurat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang relevan. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, penggunaan metode dan asumsi yang spesifik perlu dirumuskan untuk mengakomodasi berbagai *shock* yang terjadi sehingga diperoleh hasil perhitungan yang valid dan realistis. Potensi yang akurat ini selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan seberapa besar target penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi untuk kebutuhan penganggaran dalam membiayai pembangunan daerah.

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Potret terkini berupa identifikasi faktor strategis internal dan eksternal juga akan dipetakan guna menurunkan rencana strategis yang dapat diadopsi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif akan dirancang

sedemikian rupa untuk dapat menjawab tujuan penelitian secara komprehensif dan tepat sasaran.

## **1.2. TUJUAN KEGIATAN**

Mengingat pentingnya dokumen Risroda dalam menentukan arah pembangunan daerah, maka setidaknya kajian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kinerja penerimaan pajak dan retribusi Kota Bukittinggi sebelum dan saat pandemi covid 19
- b. Menganalisis potensi pajak dan retribusi Kota Bukittinggi pasca Pandemi covid 19.
- c. Memproyeksikan potensi dan penerimaan pajak dan retribusi Kota Bukittinggi periode 5 tahun ke depan
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai aspek, meliputi: kelembagaan, SDM, infrastruktur, sistem, hingga kondisi eksternal yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah
- e. Mengkaji kemungkinan penghapusan retribusi parkir di beberapa Kawasan objek wisata dan dampaknya terhadap kunjungan wisatawan ke Bukittinggi
- f. Menganalisis dan melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak dan retribusi dari UMKM kuliner malam di Kota Bukittinggi
- g. Menganalisis kebutuhan, rekomendasi kebijakan dan strategi pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah

## **1.3. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
- b. Menemukan sejauh mana potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi dapat diukur secara akurat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

- c. Untuk menentukan arah kebijakan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran dalam melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Bukittinggi.